



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2020**

**PURWODADI, 2021**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan selama tahun 2020, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Bupati Grobogan serta kebijakan dan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan 2016-2021.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan secara lebih sinergis.

Purwodadi, 15 Februari 2021

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN'. The inner ring contains 'BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH'. In the center, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed in bold black text.

**PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM**  
**NIP. 197204091992031002**

## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai visi dan misi Bupati Grobogan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Grobogan tersebut.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dapat berperan aktif dan bekerja sama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 dapat dikatakan baik. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan 2020 dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 menunjukkan bahwa:

1. **Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis** dari 27 (dua puluh tujuh) kegiatan adalah 95,31 %.
2. **Capaian indikator kinerja utama** yaitu prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi jabatan, realisasinya **81,34** %. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah **90** %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah **90,38** % dan termasuk dalam kategori **tinggi**. Sedangkan indikator kedua yaitu prosentase penurunan jumlah pelanggaran kasus disiplin ASN realisasinya **50,00** %. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah **30** %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah **166,67** % dan termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian

antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam bentuk memberikan masukan kepada aparatur pemerintah daerah tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik di bidang teknis operasional maupun di bidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi, serta dapat memberikan masukan tentang tingkat-tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan. Kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati Grobogan.

Purwodadi, 15 Februari 2020

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN'. The inner part of the stamp reads 'BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

**PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM**  
**NIP. 197204091992031002**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Ikhtisar Eksekutif	.....	iii
Daftar Isi	.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
I Gambaran Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	.....	1
A Kelembagaan Organisasi	.....	1
B Uraian Organisasi	.....	2
II Fungsi Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	.....	3
III Permasalahan Umum Organisasi	.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.....	5
I Perencanaan Kinerja	.....	5
A Visi dan Misi	.....	5
B Tujuan dan Sasaran	.....	7
II Perjanjian Kinerja	.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	.....	10
I Capaian Kinerja Organisasi	.....	10
II Realisasi Anggaran	.....	18
BAB IV PENUTUP	.....	23
I Tinjauan Umum Capaian Kinerja	.....	23
II Strategi / Program Kerja Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang	.....	24
Lampiran-Lampiran	.....	25





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

#### **A. Kelembagaan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
  - a. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pendataan.
  - b. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
  - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.

- b. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
- 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- 6. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahi:
  - a. Sub Bidang Pembinaan Kedisiplinan.
  - b. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Penilaian Kinerja.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

## **B. Uraian Organisasi**

Susunan organisasi sebagaimana tersebut di atas, jumlah karyawan yang ada, baik pejabat maupun staf adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Pegawai berdasarkan kualitas pendidikan :
  - a. Pasca Sarjana : 9 orang
  - b. D IV / Sarjana : 24 orang
  - c. Sarmud (D1 -DIII) : 8 orang
  - d. SLTA : 9 orang
  - e. SLTP : 0 orang
  - f. SD : 0 orang
- 2. Pegawai berdasarkan golongan :
  - a. Golongan IV : 4 orang
  - b. Golongan III : 36 orang
  - c. Golongan II : 10 orang
- 3. Pegawai berdasarkan jabatan :
  - a. Eselon II : 1 orang
  - b. Esselon III : 5 orang
  - c. Esselon IV : 11 orang
  - d. Staf : 33 orang

## **II. FUNGSI STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, tugas pokok dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan Pegawai ASN, mutasi Pegawai ASN, pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN serta pembinaan Pegawai ASN di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas pokok di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. pengelolaan kesekretariatan Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### III. PERMASALAHAN UMUM ORGANISASI

Kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepegawaian sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan. Pembinaan teknis dan administratif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Pemasalahan umum (*strategic issued*) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan,
2. Masih terjadinya pelanggaran disiplin aparatur pemerintah, dan
3. Masih kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### I. Perencanaan Kinerja

##### A. Visi dan Misi

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, serta dalam rangka memacu motivasi kerja dan memperjelas arah peningkatan kinerja organisasi, visi (gambaran/kondisi yang ingin dicapai di masa depan) yang ditetapkan oleh Bupati / Wakil Bupati Grobogan adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”.**

Penjelasan dari Visi Bupati / Wakil Bupati Grobogan adalah sebagai berikut;

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten.

Selanjutnya untuk memperjelas tahapan pencapaiannya, visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Untuk kurun waktu Tahun Anggaran 2016-2021 misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman dan sumberdaya air;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat;
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan diklat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen kepegawaian di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok di atas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mendukung pencapaian misi ke-6 (enam) yaitu ***meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.***

## **B. Tujuan dan Sasaran.**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Grobogan yang telah ditetapkan serta analisis terhadap lingkungan, tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah ***meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan ASN.***

#### **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah ***meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN.***

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan diperlihatkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BKPPD Kabupaten Grobogan



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan ASN	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	1. Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan 2. Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN

### 3. Target Kinerja

Adapun Target Kinerja yang akan dicapai tercantum pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Target Kinerja BKPPD Kabupaten Grobogan

No.	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	80	80	82	85	90	95
2	Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN	10	15	20	25	30	35

## II. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan / Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Grobogan dengan Bupati Grobogan Tahun 2020, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2020 telah melaksanakan 4 (empat) program yang terjabar dalam 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 4.245.695.800,00 (*Empat milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

#### I. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pada tahun 2020, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, penilaian capaian kinerja diukur dengan :

**1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020**

Target dan realisasi capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 diperlihatkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran BKPPD Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Ket.
1	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	90	81,34	
		Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN	30	50,00	

Indikator prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan di sini adalah : untuk pejabat struktural apabila telah memenuhi persyaratan pendidikan, kepangkatan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Sedangkan kompetensi jabatan untuk pejabat fungsional apabila telah memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Indikator prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN adalah jenis pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundangan tentang disiplin ASN.

## 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020 diperlihatkan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian*)	
					Nilai	Kriteria
1	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	90	81,34	90,38	Tinggi
		Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN	30	50,00	166,67	Sangat Tinggi

\*)Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017

## 3. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja organisasi tahun ini jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	82,00	84,46	85,00	87,07	90,00	81,34
2	Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN	20,00	24,00	25,00	36,84	30,00	50,00

Berdasarkan Tabel 3.4 terdapat kenaikan capaian kinerja yaitu : untuk indikator prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan mengalami penurunan sebesar 5,73 % dari 87,07 % pada tahun 2019 menjadi 81,34 % pada tahun 2020. Sedangkan untuk indikator prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 135,72 % dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN sebesar 50,00 % sedangkan tahun 2019 sebesar 36,84 %.

**4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Tabel 3.5 memperlihatkan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja s.d. tahun 2020

Indikator Utama	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	%	82.00	84.46	103.00	85.00	87.07	102.43	90.00	81.34	90.38
Prosentase penurunan jumlah pelanggaran kasus disiplin pegawai	%	20.00	24.00	120.00	25.00	36.84	147.37	30.00	50.00	166.67

Dari tabel 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dokumen perencanaan strategis rata-rata setiap tahunnya dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- a. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja. Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan adanya kerjasama dari semua pihak dan upaya-upaya peningkatan kompetensi ASN dengan melaksanakan diklat secara berkelanjutan. Di samping itu adanya sosialisasi dan pembinaan ASN tentang kedisiplinan ASN dapat menekan angka pelanggaran disiplin ASN setiap tahunnya. Monitoring dan evaluasi yang rutin setiap periodenya juga menjadi salah satu faktor yang dapat menekan angka pelanggaran disiplin ASN.
- b. Alternatif solusi yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi dengan BPSDM Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mengirimkan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengikuti diklat PIM di BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Serta kerjasama dengan BKN Regional I Yogyakarta dan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembinaan kepegawaian terutama tentang kedisiplinan ASN.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya, terutama anggaran, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga di beberapa kegiatan, anggaran yang tersedia tidak terserap maksimal tetapi output yang dihasilkan dapat maksimal sesuai target, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	7.841.500	1,98	Terlaksananya jasa surat menyurat kantor	surat	4.000	4.000
2	Penyediaan Jasa	95.000.000	84.396.300	11,16	terlaksananya jasa	bulan	12	12

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor			
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	19.831.000	0,84	terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	17	17
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.333.000	71.786.700	5,96	terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	jenis	41	41
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.960.000	44.583.800	15,82	terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan	Item	7	7
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.0000	13.953.000	6,98	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	item	14	14
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.446.000	76.496.140	4,91	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	9	9
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	5.617.500	29,78	output tersedianya bahan bacaan ASN di BKPPD Kab Grobogan	item	3	3
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	77.400.000	73.882.000	4,55	terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk ASN dan tamu/undangan rapat di BKPPD Kabupaten Grobogan	porsi	1.955	1.955
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	788.624.000	788.564.679	0,01	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ohk	675	675
11	Rapat-Rapat Koordinasi Di Dalam Daerah	20.000.000	19.858.000	0,71	output terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait di wilayah Kabupaten Grobogan	ohk	103	103
12	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan	65.875.000	59.344.250	9,91	bersihnya ruang kantor dan lingkungan, terjaganya	orang	4	4



No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
	Dan Transportasi				keamanan kantor dan tersedianya tenaga pengemudi kendaraan dinas			
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.930.500	0,35	terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	unit	1	1
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	55.000.000	51.728.776	5,95	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	unit	19	19
15	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	182.000.000	177.000.000	2,75	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Unit	1	1
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	68.800.000	65.210.000	5,22	Terakomodasinya ASN yang melaksanakan tugas belajar	orang	10	9
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian	orang	0	0
18	Pendidikan dan Pelatihan Pra jabatan bagi Calon PNSD	0	0	0	terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS	orang	0	0
19	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	681.130.000	622.310.663	8,64	terlaksananya diklat struktural bagi pejabat eselon II, III dan IV	orang	43	43
20	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	186.490.000	178.100.400	4,50	terlaksananya pembinaan dan pengembangan jabatan struktural dan kepala sekolah	%	80	80
21	Pembangunan /Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	60.000.000	59.610.000	0,65	terlaksananya pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian	buah	1	1
22	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	5.075.000	5.075.000	0,00	terlaksananya pembinaan disiplin aparaturnya bagi pejabat kepegawaian OPD	orang	0	0

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
23	Pembinaan dan Fasilitasi PNSD yang memasuki Purna Tugas	29.004.800	29.004.800	0,00	terlayannya dan terfasilitasinya administrasi kepegawaian PNSD	orang	460	460
24	Seleksi Terbuka, Mutasi dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi	507.975.000	459.588.300	9,53	jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi pratama	orang	31	31
25	Penataan Sistem Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS	20.000.000	19.171.000	4,15	Terlaksananya administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS	ASN	490	490
26	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	21.050.000	18.850.000	10,45	terlaksananya diklat teknis, tugas dan fungsi bagi PNSD	orang	6	6
27	Seleksi Penerimaan Calon ASN	1.101.533.000	1.074.832.765	2,42	Terlaksananya seleksi Calon CASN	orang	8500	8500
	Jumlah	4.245.695.800	4.046.567.073	4,69				

Secara keseluruhan sumber daya anggaran yang tersedia adalah Rp 4.245.695.800,- dengan realisasi penggunaan sebesar Rp 4.046.567.073,- atau sebesar 95,31 % yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 4,69 %.

## **7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian Pernyataan Kinerja di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan didukung oleh 4 (empat) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Program-program dan indikator program yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Program-Program yang Dilaksanakan BKPPD Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi
1	Pelayanan Adminsitrator Perkantoran	Prosentase Kuantitas Pelayanan Adminisrasi Perkantoran	%	100	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik	%	90	90
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat PIM (II, III, IV)	%	80	62,68
4	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100

## II. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dalam pelaksanaan sasaran strategis dan indikator sasaran diwujudkan dengan lima program dan tiga puluh lima kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, pada tahun anggaran 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.245.695.800,00 (*empat milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*) yang penggunaannya dijabarkan dalam Tabel 3.9 di bawah ini

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			RUPIAH	%	%	RUPIAH	%	%	
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,307,638,000</b>	<b>1,307,638,000</b>	<b>100</b>		<b>1,266,154,869</b>	<b>96.83</b>	<b>100.00</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000	8,000,000	100	100	7,841,500	98.02	100.00	Kasubag Umum
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95,000,000	95,000,000	100	100	84,396,300	88.84	100.00	Kasubag Umum
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	20,000,000	100	100	19,831,000	99.16	100.00	Kasubag Umum
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76,333,000	76,333,000	100	100	71,786,700	94.04	100.00	Kasubag Umum
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52,960,000	52,960,000	100	100	44,583,800	84.18	100.00	Kasubag Umum
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	15,000,000	100	100	13,953,000	93.02	100.00	Kasubag Umum
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,446,000	80,446,000	100	100	76,496,140	95.09	100.00	Kasubag Umum
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	8,000,000	8,000,000	100	100	5,617,500	70.22	100.00	Kasubag Umum
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	77,400,000	77,400,000	100	100	73,882,000	95.45	100.00	Kasubag Perencanaan
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	788,624,000	788,624,000	100	100	788,564,679	99.99	100.00	Kasubag Perencanaan
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	20,000,000	20,000,000	100	100	19,858,000	99.29	100.00	Kasubag Perencanaan
12	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	65,875,000	65,875,000	100	100	59,344,250	90.09	100.00	Kasubag Umum

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			RUPIAH	%	%	RUPIAH	%	%	
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>257,000,000</b>	<b>257,000,000</b>	<b>100</b>		<b>248,659,276</b>	<b>96.75</b>		
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	20,000,000	20,000,000	100	100	19,930,500	99.65	100.00	Kasubag Perencanaan
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	55,000,000	55,000,000	100	100	51,728,776	94.05	100.00	Kasubag Umum
15	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedng Kantor	182,000,000	182,000,000	100	100	177,000,000	97.25	100.00	Kasubag Umum
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>749,930,000</b>	<b>749,930,000</b>	<b>100</b>		<b>687,520,663</b>	<b>91.68</b>		
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	68,800,000	68,800,000	100	100	65,210,000	94.78	100.00	Kasubid Diklat Struktural
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	0	#DIV/0!	100	0	#DIV/0!	0.00	Kasubag Perencanaan
18	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSD	-	0	#DIV/0!	100	0	#DIV/0!	0.00	Kasubid Diklat Fungsional
19	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	681,130,000	681,130,000	100	100	622,310,663	91.36	100.00	Kasubid Diklat Fungsional

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			RUPIAH	%	%	RUPIAH	%	%	
<b>E</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>1,931,127,800</b>	<b>1,931,127,800</b>	<b>100</b>		<b>1,844,232,265</b>	<b>95.50</b>	<b>53.33</b>	
20	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	186,490,000	186,490,000	100	<b>100.00</b>	178,100,400	95.50	100.00	Kasubid Jabatan dan Pendataan
21	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	60,000,000	60,000,000	100	<b>100.00</b>	59,610,000	99.35	100.00	Kasubid Formasi dan Pengadaan
22	Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	5,075,000	5,075,000	100	<b>100.00</b>	5,075,000	100.00	100.00	Kasubid Pembinaan Kedisiplinan Pegawai
23	Pembinaan dan Fasilitasi PNSD yang Memasuki Purna Tugas	29,004,800	29,004,800	100	<b>100.00</b>	29,004,800	100.00	100.00	Kasubid Pengangkatan, Pemindehan, Pemberhentian
24	Seleksi Terbuka, Mutasi dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi	507,975,000	507,975,000	100	<b>100.00</b>	459,588,300	90.47	100.00	Kasubid Jabatan dan Pendataan
25	Penataan Sistem Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS	20,000,000	20,000,000	100	<b>100.00</b>	19,171,000	95.86	100.00	Kasubid Kepangkatan dan Penggajian
26	Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNSD	21,050,000	21,050,000	100	<b>100.00</b>	18,850,000	89.55	100.00	Kasubid Diklat Fungsional
27	Seleksi Penerimaan Calon ASN	1,101,533,000	1,101,533,000	100	<b>100.00</b>	1,074,832,765	97.58	100.00	Kasubid Formasi dan Pengadaan
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,245,695,800</b>	<b>4,245,695,800</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>4,046,567,073</b>	<b>95.31</b>	<b>100.00</b>	

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2020, yang secara ringkas komposisi penggunaan dan realisasinya sebagaimana tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10 Penyerapan Anggaran Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Operasi	3.983.249.800,-	3.793.070.933,-	95,23 %
2	Belanja Modal	262.446.000,-	253.496.140,-	96,59 %
Jumlah		4.245.695.800,-	4.046.567.073,-	95,31 %

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2020, apabila dibandingkan Tahun 2019 maka terjadi peningkatan sebesar 6,26 %, sebagaimana tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12 Penyerapan Anggaran Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

No	T.A.	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2016	6.480.000.000,-	5.513.608.605,-	85,09 %
2	2017	7.693.500.000,-	6.626.271.811,-	86,13 %
3	2018	6.599.927.000,-	6.230.669.551,-	94,41 %
4	2019	10.110.842.500,-	8.912.911.492,-	88,15 %
5	2020	4.245.695.800,-	4.046.567.073,-	95,31 %

Pada tahun anggaran 2020 terjadi peningkatan prosentase penyerapan anggaran dibandingkan tahun 2019, tetapi dari jumlah anggaran mengalami penurunan dikarenakan refocusing anggaran berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **I. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai Perangkat Daerah teknis mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan diklat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen kepegawaian di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya aparatur, sumber dana anggaran dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin .

Memperhatikan uraian dan data capaian kinerja tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator sasaran yaitu prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi jabatan, realisasinya **81,34 %**. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah 90 %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah **90,38 %** dan termasuk dalam kategori **tinggi**. Sedangkan indikator kedua yaitu prosentase penurunan jumlah pelanggaran kasus disiplin ASN realisasinya **50 %**. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah 30 %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah **166,67 %** dan termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.



## II. Strategi / Program Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Strategi / Program yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan di masa mendatang antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Kepegawaian Daerah
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan /evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Purwodadi, 15 Februari 2021

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN" around the perimeter and "BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH" in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

**PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM**  
**NIP. 197204091992031002**



# **LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

---

# Perhitungan Indikator Kinerja Utama

## 1) Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan

### Formulasi / Rumus Perhitungan :

Jumlah pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi jabatan dibagi dengan jumlah seluruh pejabat struktural yang ada dikalikan 100 % ditambah jumlah pejabat fungsional yang memenuhi standar kompetensi dibagi dengan jumlah seluruh pejabat fungsional yang ada dikalikan 100%, kemudian dibagi dua.

Data Jumlah Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Grobogan

NO.	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH JABATAN	DIKLATPIM / DIKLAT KOMPETENSI JABATAN	
			SUDAH	BELUM
1	Pejabat Eselon II	35	15	20
2	Pejabat Eselon III	187	96	91
3	Pejabat Eselon IV	740	492	248
	Jumlah	962	603	359
4	Pejabat Fungsional (Guru, Kesehatan dan Lainnya)	5289	5289	-

## 2) Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN

### Formulasi / Rumus Perhitungan :

Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN tahun n-1 dikurangi jumlah kasus pelanggaran disiplin tahun n dibagi jumlah kasus pelanggaran disiplin tahun n-1 dikalikan 100 %.

$$\frac{(n-1) - n}{n-1} \times 100 \%$$

Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Tahun 2019 sejumlah 12 kasus

Tahun 2020 sejumlah 6 kasus